

# DESENTRALISASI FISKAL DAERAH OTONOM BARU (STUDI ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN SEBAGAI DAERAH OTONOM BARU)

SHAFIERA AMALIA, S.IP.

Peneliti Pertama

Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur  
PKP2A I LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Jl. Kiara Payung Km. 4,7 Jatinangor Sumedang, Telp. (022) 7790048, Fax (022)  
7790055

Email : Shafiera\_amalia@yahoo.com

**Fiscal Decentralization on the New Autonomous Region  
(Analysis Study Financial Capability in the regions/cities  
in Riau Island Province as a New Autonomus Region)**

*This research aims to describe fiscal independency in regions (cities) /municipalities in Kepulauan Riau Province. Researcher selected Kepulauan Riau Province because seven regions/municipalities in Kepulauan Riau Province are new local government; and regions/municipalities in Kepulauan Riau Province have a lot of natural resources. Fiscal independency is measured used degree of Fiscal Desentralization concept. This Research used qualitative approach and descriptive method. Beside that, this research used data local government budget (APBD) regions/municipalities in Kepulauan Riau Province periode 2008-2012 which is got from Indonesian Finance Ministry. The result show there are five regions/municipalities in Kepulauan Riau Province have well fiscal independency and low dependency about central government. And just two regions/municipalities in Kepulauan Riau Province still have bad fiscal independency and high dependency about central government.*

**Keywords :** Decentralization, Degree of Fiscal Desentralization, Regions/Municipalities in Kepulauan Riau Province.

## A. PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan. Tujuannya adalah untuk mendekatkan berbagai pelayanan kepada masyarakat; dan pemerataan

pembangunan di daerah yang akan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan otonomi daerah dilaksanakan bersamaan dengan kebijakan pemekaran wilayah, baik wilayah propinsi maupun wilayah Kabupaten/Kota. Wilayah

propinsi/Kabupaten/Kota yang dinilai terlalu luas secara geografis dimekarkan menjadi daerah baru. Menurut Kementerian Dalam Negeri (2012), terdapat 7 provinsi, 156 kabupaten dan 32 kota hasil pemekaran wilayah.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi baru hasil pemekaran dari Provinsi Riau yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.

Ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, yakni pesatnya perkembangan dan kemajuan di wilayah Kepulauan Riau, letaknya yang strategis dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Adapun tujuan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau adalah untuk mendorong peningkatan pelayanan; memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah; dan memperpendek rentang kendali dan meningkatkan stabilitas nasional. Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau pada awalnya Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari Kabupaten Kepulauan Riau; Kabupaten Karimun; Kabupaten Natuna; Kota Batam; dan Kota Tanjung Pinang.

Sebelum dimekarkan menjadi provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Lingga adalah bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau Provinsi Riau. Kota Batam, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna resmi menjadi daerah otonom baru pada tanggal 4

Oktober 1999. Kota Tanjung Pinang menjadi daerah otonom baru pada tanggal 21 Juni 2001. Kabupaten Lingga menjadi daerah otonom baru pada tanggal 18 Desember 2003 setelah terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Riau yang menjadi daerah induk berganti nama menjadi Kabupaten Bintan. Pada tanggal 24 Juni 2008, Kabupaten Natuna dimekarkan sehingga terbentuk satu daerah otonom baru yaitu Kabupaten Anambas. Dengan demikian, pada tahun 2013 ini, Provinsi Kepulauan Riau memiliki lima pemerintah daerah kabupaten, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Anambas. Dan provinsi ini terdiri dari dua pemerintah daerah kota, yaitu Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang memiliki wilayah strategis dan kaya akan sumber daya alam. Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dianugerahi berbagai potensi sumber daya alam yang siap dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan. Kabupaten Karimun memiliki potensi industri galangan kapal; pariwisata; industri maritim. Kabupaten Bintan memiliki potensi pariwisata; agro bisnis, perikanan; industri. Sementara itu, Kabupaten Natuna memiliki potensi pertambangan minyak dan gas; pertanian; perikanan; pariwisata. Kota Batam memiliki potensi pariwisata; Industri; galangan kapal; perkapalan (*transshipment*). Kota Tanjung Pinang memiliki potensi industri garmen; pengepakan makanan;

pendukung pariwisata; properti. Kabupaten Lingga memiliki potensi pariwisata maritim dan sejarah; pertanian; perikanan pertambangan bauksit, timah, granit. Dan Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi pertambangan minyak dan gas; pertanian; perikanan; pariwisata.

Dengan potensi besar yang dimiliki tersebut, diasumsikan bahwa Kabupaten /Kota di Provinsi Kepulauan Riau dan juga provinsi lain yang kaya potensi dan sumber daya alam, memiliki penerimaan besar untuk membiayai berbagai kegiatan pelayanan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan penerimaan yang besar, diasumsikan Daerah menjadi mandiri dan ketergantungannya kepada Pemerintah Pusat semakin rendah.

Namun, kondisi empiris tidaklah demikian. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, kemampuan keuangan beberapa Daerah di Indonesia masih rendah dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat tinggi. Menurut Statistik Aparatur Indonesia (2012), pada tahun 2010, terdapat 483 Kabupaten/Kota yang memiliki kontribusi PAD kurang dari 25% dari total anggaran pendapatan. Sementara pada tahun 2011, terdapat 489 Kabupaten/Kota yang memiliki kontribusi PAD kurang dari 25% dari total anggaran pendapatan. Dengan demikian, sekitar 99% pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia masih memiliki PAD yang rendah. Sementara dari sisi dana transfer yang diberikan pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), masih menurut Statistik Aparatur

Indonesia (2012), pada tahun 2010 ada sebanyak 351 pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki kontribusi DAU antara 50%-75% dari anggaran pendapatan; dan pada tahun 2011, ada sebanyak 385 pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki kontribusi DAU antara 50%-75% dari anggaran pendapatan. Dengan demikian, sekitar 78% pemerintah Kabupaten/Kota masih memiliki ketergantungan pendapatan dengan pemerintah pusat karena besarnya kontribusi DAU bagi anggaran pendapatan daerah Kabupaten/Kota.

Kasus yang lebih spesifik, Muhammad Zaenudin (2009) dalam penelitiannya menemukan bahwa derajat otonomi fiskal di lima Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada kurun waktu tahun 1999-2006 menunjukkan bahwa kenaikan derajat otonomi fiskal di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta rendah selama periode tahun 1999-2006. Disisi yang lain, hasil perhitungan menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.

Berpijak dari kondisi itu, menarik untuk melihat bagaimana kemampuan keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau pada periode tahun 2008-2012. Apakah setelah sepuluh tahun pembentukannya, Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau sudah memiliki kemandirian keuangan dan ketergantungan yang rendah terhadap

pemerintah pusat atau apakah sama dengan daerah lain yang memiliki PAD yang rendah dan ketergantungannya kepada pusat masih tinggi.

## B. RUMUSAN MASALAH

Dari berbagai latar belakang di atas, penelitian ini berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut :

1. Apakah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau sudah memiliki kemandirian keuangan daerah?
2. Bagaimana derajat desentralisasi fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2008-2012?

## C. DESENTRALISASI FISKAL

Desentralisasi secara umum merupakan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Sidik (2002) mengemukakan bahwa Desentralisasi merupakan sebuah instrumen untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Dengan desentralisasi akan diwujudkan dalam pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*), terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat.

Masih menurut Sidik (2002), Secara umum, konsep desentralisasi terdiri atas Desentralisasi Politik (*Political Decentralization*); Desentralisasi

Administratif (*Administrative Decentralization*); Desentralisasi Fiskal (*Fiscal Decentralization*); dan Desentralisasi Ekonomi (*Economic or Market Decentralization*). Dari beberapa jenis desentralisasi, tulisan ini berfokus pada konsep desentralisasi fiskal (*Fiscal Decentralization*). Desentralisasi fiskal secara umum merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dan membelanjakan pendapatannya untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan desentralisasi dapat berhasil apabila pemerintah daerah didukung dengan sumber keuangan yang memadai.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia masih dititik beratkan pada sisi pengeluaran, yaitu pemerintah daerah diberi kebebasan untuk membelanjakan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Sementara dari sisi penerimaan, desentralisasi belum sepenuhnya dapat dilakukan. Pemerintah daerah memang diberikan kebebasan untuk menggali sumber pendapatan, tetapi tidak untuk eksplorasi sumber daya alam. Eksplorasi SDA masih dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat pun masih harus memberikan dana transfer salah satunya dalam bentuk dana alokasi umum (DAU) kepada daerah. Tujuan pemberian dana transfer ini adalah untuk pemeratakan kemampuan keuangan setiap Daerah agar tidak terjadi kesenjangan fiskal antara Daerah. Menurut Saragih (2003), tidak semua daerah mempunyai struktur dan kemampuan fiskal yang sama (*horizontal fiscal imbalance*). Masing-masing Daerah memiliki perbedaan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, potensi sumber daya, kondisi dan kekayaan alam, dan lain-lain.

Seiring dengan perjalanan pelaksanaan desentralisasi, seharusnya Daerah semakin meningkat kemampuannya untuk menggali potensi daerah yang berujung pada peningkatan pendapatan daerah; dan semakin rendahnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Namun, menurut Kuncoro (2004), realitas hubungan fiskal antara pusat-daerah saat ini masih ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap daerah. Hal ini terlihat dari

rendahnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah dibanding besarnya subsidi (*grant*) yang diberikan dari pusat. Menurut Musgrave (1991) dalam Zaenudin (2009) dalam mengukur kemampuan daerah dalam menggali sumber pendapatan dan ketergantungannya terhadap pemerintah pusat (kinerja keuangan daerah) digunakan konsep derajat desentralisasi fiskal. Derajat desentralisasi fiskal diukur dengan melihat rasio :

- a. Pendapatan asli daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah (TPD);

$$\frac{\text{PAD}}{\text{TPD}}$$

- b. Bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP) dengan dengan total penerimaan daerah (TPD);

$$\frac{\text{BHPBP}}{\text{TPD}}$$

- c. Sumbangan dari pusat dengan total penerimaan daerah (TPD).

$$\frac{\text{Sum}}{\text{TPD}}$$

Setelah itu, untuk mengukur tingkat desentralisasi fiskal, dapat menggunakan kriteria derajat desentralisasi fiskal yang telah

dirumuskan oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri) pada tahun 1991, yaitu :

Tabel 1. Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal

No.	% Derajat Desentralisasi Fiskal	Kriteria
	0,00 - 10,00	Sangat Kurang
	10,10 - 20,00	Kurang
	20,10 - 30,00	Sedang
	30,10 - 40,00	Cukup
	40,10 - 50,00	Baik
	Di atas 50,00	Sangat Baik

Sumber : Litbang Depdagri, 1991

#### D. PENDEKATAN ANALISA KEUANGAN DAN DERAJAT FISKAL

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau periode tahun 2008-2012 yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Disebut dengan penelitian deskriptif karena penelitian ini berupaya untuk menggambarkan (mendeskripsikan) bagaimana derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau; dan dalam teknik analisis datanya menggunakan teknik statistik deskriptif. Menurut Manurung (2008) dalam Fattah (2012), statistik deskriptif merupakan metode yang menggambarkan keadaan obyek penelitian berdasarkan data kuantitatif yang disajikan dalam bentuk tabulasi dan visualisasi berupa grafik, dengan ukuran-ukuran statistik sederhana seperti jumlah (total), rata-rata, pertumbuhan, persentase (%), proporsi, rasio yang dapat diterapkan sebagai alat analisis.

#### E. PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, terdapat dua fokus pembahasan, yaitu gambaran

keadaan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau periode tahun 2008-2012; dan derajat desentralisasi fiskal pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau periode tahun 2008-2012. Bagian mengenai keadaan keuangan disajikan untuk memberikan gambaran mengenai total pendapatan; Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP); dana sumbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau serta pertumbuhannya pada tahun 2008-2012. Dan pada bagian berikutnya dijelaskan mengenai derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten/Kota di provinsi Kepulauan Riau untuk melihat kemandirian daerah dan ketergantungan Daerah terhadap pemerintah pusat.

#### 1. KEADAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Berikut akan disajikan tabel mengenai keadaan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi total pendapatan; Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP); dan dana sumbangan.

Tabel 2.  
Total Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008-2012  
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Kab. Karimun	Kab. Bintan	Kab. Natuna	Kota Batam	Kota T.Pinang	Kab. Lingga	Kab. K. Anambas
2008	434.226	359.530	716.543	713.798	386.549	389.420	tdk ada data
2009	556.322	500.291	739.369	1.006.606	579.555	354.557	269.720
2010	442.306	418.997	576.140	1.052.795	450.865	386.220	573.229
2011	574.082	618.012	909.538	1.354.423	581.172	520.988	685.909

Tahun	Kab. Karimun	Kab. Bintan	Kab. Natuna	Kota Batam	Kota T.Pinang	Kab. Lingga	Kab. K. Anambas
2012	795.267	692.852	1.240.230	1.406.976	653.998	616.649	802.387

Sumber : APBD Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Diolah.

Catatan : Kabupaten Kepulauan Anambas baru terbentuk pada tahun 2008 sehingga tidak ada data pendapatan kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2008

Tabel 3.  
Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau  
Tahun 2008-2012

Tahun	Kab. Karimun	Kab. Bintan	Kab. Natuna	Kota Batam	Kota T.Pinang	Kab. Lingga	Kab. K. Anambas	Rata-rata pertahun
2008/2009	28%	39%	3%	41%	50%	-9%	tdk ada data	25%
2009/2010	-20%	-16%	-22%	5%	-22%	9%	113%	6%
2010/2011	30%	47%	58%	29%	29%	35%	20%	35%
2011/2012	39%	12%	36%	4%	13%	18%	17%	20%
rata per kab/kota	19%	21%	19%	20%	17%	13%	50%	

Sumber : APBD Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Diolah.

Catatan : Kabupaten Kepulauan Anambas baru terbentuk pada tahun 2008 sehingga tidak ada data pendapatan kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2008

Tabel 2 dan 3 di atas menggambarkan total pendapatan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Dari tabel 2 diatas terlihat bahwa Kota Batam memiliki total pendapatan terbanyak dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu, dari tabel 3 terlihat bahwa pertumbuhan total pendapatan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan

Riau fluktuatif. Adapun Kabupaten/Kota yang paling tinggi rata-rata pertumbuhannya adalah Kabupaten Kepulauan Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan kabupaten yang baru terbentuk tahun 2008, sehingga kabupaten ini terus berupaya untuk meningkatkan pendapatannya.

Tabel 4.  
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau  
Tahun 2008-2012 (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Kab. Karimun	Kab. Bintan	Kab. Natuna	Kota Batam	Kota T.Pinang	Kab. Lingga	Kab. K. Anambas
2008	104.021	74.529,50	5.616	94.892	10.446	2.450	tdk ada data
2009	223.613	132.761	13.792	184.208	41.954	29.380	tdk ada data
2010	236.916	119.672	14.344	195.282	46.824	12.021	4.800
2011	177.430	121.536	20.847	369.983	65.624	12.500	14.202

DESENTRALISASI FISKAL DAERAH OTONOM BARU (STUDI ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN SEBAGAI DAERAH OTONOM BARU)

Shafiera Amalia, S.IP

Tahun	Kab. Karimun	Kab. Bintan	Kab. Natuna	Kota Batam	Kota T.Pinang	Kab. Lingga	Kab. K. Anambas
2012	184.394	141.051	25.192	375.608	70.013	16.053	39.759

Sumber : APBD Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Diolah.

Catatan : Kabupaten Kepulauan Anambas baru terbentuk pada tahun 2008 sehingga tidak ada data pendapatan kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2008.

Tabel 5.  
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008-2012

Tahun	Kab. Karimun	Kab. Bintan	Kab. Natuna	Kota Batam	Kota T.Pinang	Kab. Lingga	Kab. K. Anambas	Rata-rata pertahun
2008/2009	115%	78%	146%	94%	302%	1099%	tdk ada data	306%
2009/2010	6%	-10%	4%	6%	12%	-59%	tdk ada data	-7%
2010/2011	-25%	2%	45%	89%	40%	4%	196%	50%
2011/2012	4%	16%	21%	2%	7%	28%	180%	37%
rata per kab/kota	25%	21%	54%	48%	90%	268%	188%	

Sumber : APBD Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Diolah.

Catatan : Kabupaten Kepulauan Anambas baru terbentuk pada tahun 2008 sehingga tidak ada data pendapatan kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2008.

Tabel 4 dan 5 menunjukkan data pendapatan asli daerah (PAD) dan pertumbuhannya antara tahun 2008-2012 di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Pada tabel 4 terlihat bahwa Kota Batam memiliki PAD paling tinggi diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dikarenakan Kota Batam merupakan daerah strategis yang berdekatan dengan Singapura sehingga daerah Kota Batam sejak tahun 1970 dijadikan sebagai kawasan industri, perdagangan dan kawasan *free trade zone* yang memungkinkan Daerah ini memiliki PAD yang relatif lebih besar dari Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Dilihat dari pertumbuhannya, Kabupaten Lingga (268%) dan

Kabupaten Kepulauan Anambas (188%) memiliki pertumbuhan PAD yang sangat tinggi dan signifikan, walaupun dari segi jumlahnya, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Anambas memiliki PAD relatif kecil. Hal ini dikarenakan Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan dua kabupaten termuda di Provinsi Kepulauan Riau yang tengah berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya dan mengejar ketertinggalan dari Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 6.  
BHPBP Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008-2012  
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Kab. Karimun	Kab. Bintan	Kab. Natuna	Kota Batam	Kota T.Pinang	Kab. Lingga	Kab. K. Anambas
2008	86.825	135.522	591.699	299.550	139.021	108.652	tdk ada data
2009	115.519	178.790	596.317	362.576	269.577	90.652	225.607
2010	119.075	162.908	532.152	557.019	214.944	205.130	326.490
2011	183.718	241.910	749.671	482.504	240.601	228.417	410.274
2012	266.911	267.735	1.058.505	511.650	259.602	260.728	548.226

Sumber : APBD Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Diolah.

Catatan : Kabupaten Kepulauan Anambas baru terbentuk pada tahun 2008 sehingga tidak ada data pendapatan kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2008.

Tabel 7.  
Pertumbuhan BHPBP Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008-2012

Tahun	Kab. Karimun	Kab. Bintan	Kab. Natuna	Kota Batam	Kota T.Pinang	Kab. Lingga	Kab. K. Anambas	Rata-rata pertahun
2008/2009	33%	32%	1%	21%	94%	-17%	tdk ada data	27%
2009/2010	3%	-9%	-11%	54%	-20%	126%	45%	27%
2010/2011	54%	48%	41%	-13%	12%	11%	26%	26%
2011/2012	45%	11%	41%	6%	8%	14%	34%	23%
rata per kab/kota	34%	21%	18%	17%	23%	34%	35%	

Sumber : APBD Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Diolah.

Catatan : Kabupaten Kepulauan Anambas baru terbentuk pada tahun 2008 sehingga tidak ada data pendapatan kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2008

Sementara itu, pada tabel 6 dan 7 menunjukkan dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) yang diterima oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Dari tabel 6 di atas tampak bahwa Kabupaten yang menerima Dana BHPBP tertinggi adalah Kabupaten Natuna. Kabupaten Natuna memiliki sumber daya alam besar terutama dibidang pertambangan minyak dan gas yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Hal ini

menyebabkan Kabupaten Natuna menerima dana bagi hasil non pajak yang besar dari Pemerintah Pusat.

Tabel 8.  
Total Sumbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008-2012  
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Kab. Karimun	Kab. Bintan	Kab. Natuna	Kota Batam	Kota T.Pinang	Kab. Lingga	Kab. K. Anambas
2008	219.317	132.369	77.044	284.839	218.976	274.267	tdk ada data
2009	217.190	188.740	129.259	377.539	264.524	234.525	44.113
2010	79.793	136.417	29.644	300.494	189.098	169.069	241.939
2011	163.657	254.565	139.020	501.937	274.947	280.071	261.433
2012	343.961	284.066	156.533	519.718	324.383	339.867	214.402

Sumber : APBD Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Diolah.

Catatan : Kabupaten Kepulauan Anambas baru terbentuk pada tahun 2008 sehingga tidak ada data pendapatan kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2008.

Tabel 9.  
Pertumbuhan Total Sumbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau  
Tahun 2008-2012

Tahun	Kab. Karimun	Kab. Bintan	Kab. Natuna	Kota Batam	Kota T.Pinang	Kab. Lingga	Kab. K. Anambas	Rata-rata pertahun
2008/2009	-1%	43%	68%	33%	21%	-14%	tdk ada data	25%
2009/2010	-63%	-28%	-77%	-20%	-29%	-28%	448%	29%
2010/2011	105%	87%	369%	67%	45%	66%	8%	107%
2011/2012	110%	12%	13%	4%	18%	21%	-18%	23%
rata per kab/kota	38%	28%	93%	21%	14%	11%	146%	

Sumber : APBD Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Diolah.

Catatan : Kabupaten Kepulauan Anambas baru terbentuk pada tahun 2008 sehingga tidak ada data pendapatan kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2008

Tabel 8 dan 9 menunjukkan dana total sumbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau antara tahun 2008-2012. Dalam penelitian ini, komponen dana sumbangan yang dihitung dari komponen APBD adalah dana alokasi umum; dana alokasi khusus; dana penyesuaian (otonomi khusus); hibah; dan bantuan keuangan dari provinsi atau pmda lainnya. Dari tabel 8 terlihat

bahwa Kabupaten/Kota yang memperoleh dana sumbangan terbesar adalah Kota Batam. Dan dari tabel 9 terlihat bahwa Daerah yang memiliki pertumbuhan total sumbangan yang paling tinggi di Provinsi Kepulauan Riau antara periode 2008-2012 adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.

## 2. DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Berikut akan disajikan data derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi rasio antara PAD dengan total

pendapatan; rasio antara dana BHPBP dengan total pendapatan; dan rasio antara total sumbangan dengan total pendapatan. Dengan menghitung rasio tersebut, dapat diketahui kemampuan keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 10.  
Rasio antara PAD dengan Total Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008-2012

	2012	2011	2010	2009	2008	rata per kab/kota	Derajat Desentralisasi Fiskal
Kab. Karimun	23%	31%	54%	40%	24%	34%	Cukup
Kab. Bintan	20%	20%	29%	27%	21%	23%	Sedang
Kab. Natuna	2%	2%	2%	2%	1%	2%	Sangat kurang
Kota Batam	27%	27%	19%	18%	13%	21%	Sedang
Kota Tanjung Pinang	11%	11%	10%	7%	3%	8%	Sangat kurang
Kab. Lingga	3%	2%	3%	8%	1%	3%	Sangat kurang
Kab. Kepulauan Anambas	5%	2%	1%	tdk ada data	tdk ada data	3%	Sangat kurang
Rata-rata per tahun	13%	14%	17%	17%	10%		

Sumber : APBD Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Diolah.

Catatan : Kabupaten Kepulauan Anambas baru terbentuk pada tahun 2008 sehingga tidak ada data pendapatan kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2008-2009

Tabel 10 di atas menunjukkan perbandingan antara PAD dengan total pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Data di atas menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau tidak seragam. Kabupaten Karimun memiliki derajat desentralisasi fiskal cukup, sementara Kabupaten Bintan dan Kota Batam memiliki derajat desentralisasi fiskal sedang. Dari hasil perhitungan, ketiga Kabupaten/Kota ini telah memiliki

kemampuan PAD yang cukup baik. Namun, Kabupaten Natuna, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Kepulauan Anambas masih memiliki perhitungan derajat desentralisasi fiskal yang sangat kurang. Hal ini berarti empat Kabupaten/Kota tersebut belum memiliki PAD yang memadai untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten/Kota tersebut.

Tabel 11.  
Rasio antara BHPBP dengan Total Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008-2012

	2012	2011	2010	2009	2008	rata per kab/kota	Derajat Desentralisasi Fiskal
Kab. Karimun	34%	32%	27%	21%	20%	27%	Sedang
Kab. Bintan	39%	39%	39%	36%	38%	38%	Cukup
Kab. Natuna	85%	82%	92%	81%	83%	85%	Sangat baik
Kota Batam	36%	36%	53%	36%	42%	41%	Baik
Kota Tanjung Pinang	40%	41%	48%	47%	36%	42%	Baik
Kab. Lingga	42%	44%	53%	26%	28%	39%	Cukup
Kab. Kepulauan Anambas	68%	60%	57%	84%	tdk ada data	67%	Sangat baik
Rata-rata per tahun	49%	48%	53%	47%	41%		

Sumber : APBD Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Diolah.

Catatan : Kabupaten Kepulauan Anambas baru terbentuk pada tahun 2008 sehingga tidak ada data pendapatan kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2008.

Sementara tabel 11 menunjukkan perbandingan antara Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) dengan total pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Dari tabel di atas terlihat bahwa derajat desentralisasi fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dari perhitungan rasio BHPBP dengan total pendapatan sudah sangat baik. Derajat desentralisasi fiskal

Kabupaten Karimun sedang; sementara itu Kabupaten Bintan, kabupaten Lingga cukup; Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang baik; dan Kabupaten Natuna serta Kabupaten Kepulauan Anambas sangat baik. Data ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau sangat ditopang dari dana BHPBP.

Tabel 12.  
Rasio antara Sumbangan dengan Total Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008-2012

	2012	2011	2010	2009	2008	rata per kab/kota
Kab. Karimun	43%	29%	18%	39%	51%	36%
Kab. Bintan	41%	41%	33%	38%	37%	38%
Kab. Natuna	13%	15%	5%	17%	11%	12%
Kota Batam	37%	37%	29%	38%	40%	36%

	2012	2011	2010	2009	2008	rata per kab/kota
Kota Tanjung Pinang	50%	47%	42%	46%	57%	48%
Kab. Lingga	55%	54%	44%	66%	70%	58%
Kab. Kepulauan Anambas	27%	38%	42%	16%	tdk ada data	31%
Rata-rata per tahun	38%	37%	30%	37%	44%	

Sumber : APBD Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Diolah.

Catatan : Kabupaten Kepulauan Anambas baru terbentuk pada tahun 2008 sehingga tidak ada data pendapatan kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2008.

Tabel 12 menunjukkan rasio antara total sumbangan yang diterima dengan total pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Dari data di atas menunjukkan bahwa sumbangan tidak menjadi komponen terbesar dari total penerimaan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Hanya Kabupaten Lingga yang memiliki rasio sumbangan dengan total pendapatan rata-rata 58%, yang berarti 58% total pendapatan Kabupaten Lingga berasal dari sumbangan, baik DAU, DAK dan hibah. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lingga masih memiliki ketergantungan yang relatif tinggi terhadap pemerintah pusat. Sementara itu, Kabupaten yang memiliki rasio sumbangan terhadap total pendapatan

cukup besar adalah Kota Tanjung Pinang, yaitu rata-rata 48%. Sementara Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kota Batam dan Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki rasio sumbangan dengan total pendapatan rata-rata antara 31%-38%. Hal ini menunjukkan bahwa keempat Kabupaten/Kota tersebut sudah memiliki ketergantungan yang relatif kecil dengan pemerintah pusat. Begitu pula dengan Kabupaten Natuna yang memiliki rasio sumbangan dengan total pendapatan sangat kecil, yaitu hanya rata-rata 12%, hal ini menunjukkan Kabupaten Natuna sudah memiliki kemampuan keuangan yang baik dan ketergantungannya terhadap pemerintah pusat rendah.

Tabel 13.

Matriks Perbandingan Rata-rata rasio PAD dengan Total Pendapatan; rasio BHPBP dengan Total Pendapatan; dan rasio sumbangan dengan Total Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

	Rata-rata PAD-Total Pendapatan per kab/kota	Rata-rata BHPBP-Total Pendapatan per kab/kota	Rata-rata Sumbangan-Total Pendapatan per kab/kota
Kab. Karimun	34%	27%	36%
Kab. Bintan	23%	38%	38%
Kab. Natuna	2%	85%	12%

	Rata-rata PAD-Total Pendapatan per kab/kota	Rata-rata BHPBP-Total Pendapatan per kab/kota	Rata-rata Sumbangan-Total Pendapatan per kab/kota
Kota Batam	21%	41%	36%
Kota Tanjung Pinang	8%	42%	48%
Kab. Lingga	3%	39%	58%
Kab. Kepulauan Anambas	3%	67%	31%

Sumber : Hasil Olahan data penelitian, 2013

Tabel 13 di atas berupaya menunjukkan perbandingan rata-rata rasio PAD dengan total pendapatan; rasio BHPBP dengan total pendapatan; dan rasio sumbangan dengan total pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Matriks ini memperlihatkan bahwa selama periode tahun 2008-2012, lima Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau sudah memiliki kemampuan keuangan yang baik, yang berasal dari PAD dan BHPBP dan memiliki ketergantungan yang relatif rendah terhadap pemerintah pusat. Lima Kabupaten/Kota tersebut adalah Kabupaten Karimun; Kabupaten Bintan; Kabupaten Natuna; Kota Batam; dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Sementara itu, hanya dua Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang masih memiliki kemampuan keuangan yang kurang baik dan masih memiliki ketergantungan yang tinggi dengan pemerintah pusat, yaitu Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Lingga.

## F. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

a. Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi daerah yang besar, berbagai potensi tersebut menyebar di

seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Bila pemanfaatan potensi daerah ini dioptimalkan, akan meningkatkan pendapatan bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.

b. Pada periode tahun 2008-2012, Lima Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau yaitu Kabupaten Karimun; Kabupaten Bintan; Kabupaten Natuna; Kota Batam; dan Kabupaten Kepulauan Anambas sudah memiliki kemampuan keuangan yang baik dan memiliki ketergantungan yang relatif rendah terhadap pemerintah pusat.

c. Sementara itu, ada dua Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang belum memiliki kemampuan keuangan yang baik dan masih memiliki ketergantungan yang relatif tinggi terhadap pemerintah pusat pada periode 2008-2012, yaitu Kabupaten Lingga dan Kota Tanjung Pinang.

Melihat kepada potensi yang dimilikinya, untuk mewujudkan otonomi daerah di wilayahnya, Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau harus senantiasa mengoptimalkan potensi daerah yang dimilikinya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

## REFERENSI

- Amalia, Shafiera, dkk, 2012, *Statistik Aparatur Indonesia*, PKP2A I LAN, Bandung.
- Hasan, Pupung Puad dan Budi Pemana, 2012, Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemandirian Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Beberapa Kabupaten/Kota), PKP2A I LAN, Bandung.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004, Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Saragih, Juli Panglima, 2003, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Zaenuddin, Muhammad, 2009, Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Alat Analisis Derajat Otonomi Fiskal Daerah (Studi Kasus 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 1996-2006).  
[p2m.polibatam.ac.id/.../Microsoft-Word-Full-paper-Desentralisasi-Fis](http://p2m.polibatam.ac.id/.../Microsoft-Word-Full-paper-Desentralisasi-Fis). Diakses pada tanggal 5 Maret 2013.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010. <http://www.djpk.depkeu.go.id/publikasi/apbd> Diakses pada 11 Februari 2013.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011.  
<http://www.djpk.depkeu.go.id/publikasi/apbd> Diakses pada 11 Februari 2013.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012.  
<http://www.djpk.depkeu.go.id/publikasi/apbd> Diakses pada 11 Februari 2013.
- Profile Investment of Kepulauan Riau Province, Investment and Promotion Board Kepulauan Riau Province, 2011.
- Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.  
<http://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/seminas/article/view/138>
- Fattah, Sanusi dan Irman. 2012. Analisis Ketergantungan Fiskal Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan pada Era Otonomi Daerah.. Diakses pada tanggal 5 Maret 2013.  
<http://www.djpk.depkeu.go.id/publikasi/apbd>. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008. Diakses pada 11 Februari 2013.
- <http://www.djpk.depkeu.go.id/publikasi/apbd> Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009.. Diakses pada 11 Februari 2013.